

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2026




**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp) (Juta)	140.100.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	2.770
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	4.610
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan)	52

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.323.734.108	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 225.999.550	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 173.979.650	APBD
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 60.000.000	APBD
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 337.208.705	APBD

Palu, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dr. H. ANWAR HAFID, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710423 200003 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : TIM PERENCANAAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi - Meningkatkan Fasilitas Insentif dan kemudahan Penanaman Modal - Meningkatkan Kualitas Informasi Potensi Investasi	Persentase Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	90%	Renstra/Cascading
		Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi yang tersedia	100%	Renstra/Cascading
		- Jumlah Dokumen Regulasi dan Fasilitas Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	Renstra/Cascading
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Peluang Investasi	1 Dokumen	Renstra/Cascading

PROGRAM,KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 225.999.550	
1 Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp. 164.733.900	APBD
2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp. 61.265.650	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

UNIT KERJA : TIM PROMOSI PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	100%	Renstra/Cascading
	Meningkatnya Peminat Investasi dari Kegiatan Promosi	- Jumlah Dokumen Strategi dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi	2 Dokumen	Renstra/Cascading

PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	APBD
1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp. 100.000.000	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : TIM PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	92%	Renstra/Cascading
	- Meningkatkan Kualitas Data PMA dan PMDN	- Jumlah Dokumen Data dan Informasi PMA dan PMDN	1 Dokumen	Renstra/Cascading

PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN		KET
1 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	60.000.000	APBD
1 Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Rp.	60.000.000	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PMA/PMDN Terhadap Ketentuan Penanaman Modal	60%	Renstra/Cascading
	- Meningkatnya Perusahaan PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM	- Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM	965 Pelaku Usaha	Renstra/Cascading

PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 173.979.650	APBD
1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewewenangan Daerah Provinsi	Rp. 173.979.650	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	93%	Renstra/Cascading
	- Meningkatnya Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Koordinasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Dokumen	Renstra/Cascading

PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 273.979.750	APBD
1 Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - undangan Menjadi Kewenangan	Rp. 273.979.750	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : TIM PENGADUAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Hasil Tindak Lanjut Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan	90%	Renstra/Cascading
	- Meningkatnya layanan konsultasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Fasilitasi Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan	2 Dokumen	Renstra/Cascading

PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1 Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 63.229.000	APBD
1 Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 63.229.000	

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVALA, SE.,MM

Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 09 MARET 2026

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

NOVALA, SE.,MM
Pembina (IV/a)

Nip. 19761024 200502 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran	Indikator	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	- Indeks RB Perangkat Dearah	65,25 Indeks	DPA 2026

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.323.734.108	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.323.734.108	

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah


MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 9 Maret 2026
Sekretaris
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng


NOVAL A. SE.,MM
Pembina (IV/b)
Nip. 19761024 200502 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
UNIT KERJA : TIM KEUANGAN DAN ASSET
TAHUN ANGGARA : 2026

No.	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) serta tercapainya target realisasi anggaran	Presentase Realisasi Anggaran	100%	DPA 2026
	- Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	DPA 2026
	- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	DPA 2026
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	130 Orang/Bln	DPA 2026
	- Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	- Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	DPA 2026
	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	DPA 2026
	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	DPA 2026
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	DPA 2026
	- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	DPA 2026
	- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	DPA 2026
	- Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	DPA 2026

Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN		KETERANGAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	14.555.796.650	APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	14.400.682.332	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.	136.450.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	7.200.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	6.414.318	
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	2.350.000	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	2.800.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	1.125.000	
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	875.000	
Sub Kegiatan Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	800.000	
TOTAL ANGGARAN		14.558.596.650	

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
UNIT KERJA : TIM PROGRAM
TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, Penganggaran, evaluasi & pelaporan kinerja (Tercapainya Nilai SAKIP PD)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	DPA 2026
	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	DPA 2026
	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	DPA 2026
	- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD	2 Laporan	DPA 2026
	- Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	27 Data	DPA 2026
	- Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	DPA 2026

Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN		KETERANGAN
Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			64.808.950	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	41.717.100	APBD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	9.450.000	
3	Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp.	11.081.850	
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sertoral Daerah	Rp.	1.095.000	
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp.	1.465.000	
TOTAL ANGGARAN		Rp.	64.808.950	

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOVALA, SE., MM

Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam system Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOVALA, SE., MM

Pembina (IV/a)

Nip. 19761024 200502 1 002

Palu, 09 MARET 2026
PIHAK PERTAMA,

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM

FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM

Penata Tkt. I

Nip. 19810224 200801 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)
 UNIT KERJA : SEKRETARIAT
 SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 TAHUN ANGGARAN : 2026

No.	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah - Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1 Dokumen	DPA 2026
		- Jumlah dokumen kompilasi data administrasi kepegawaian (anjab, abk, skj, profil pegawai terdiri dari kualifikasi, kompetensi dan kinerja individu)	7 Dokumen	DPA 2026
		- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	DPA 2026
		- Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	DPA 2026
2	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), pengawasan kearsipan internal, dan Meningkatkan Kematangan SPBE Perangkat Daerah - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	DPA 2026
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	DPA 2026
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	DPA 2026
		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE)	1 dokumen	DPA 2026
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah (Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE) - Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	DPA 2026
		- Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	DPA 2026
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Tercapainya Target Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi) - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	DPA 2026
		- Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	DPA 2026
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	DPA 2026
5	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah - Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	DPA 2026
		- Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	79 unit	DPA 2026
		- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 Unit	DPA 2026
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	DPA 2026

KEGIATAN, SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

RP. 1.050.000

- 1 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi
- 2 Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
- 3 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanagn

Rp. 350.000
Rp. 350.000
Rp. 350.000

APBD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

RP. 21.190.000

- 1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 2 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 3 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Rp. 20.490.000
Rp. 350.000
Rp. 350.000

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

RP. 350.000

- 1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 350.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

RP. 538.371.508

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
- 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp. 393.000.183
Rp. 145.371.325

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

RP. 139.367.000

- 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
- 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rp. 77.500.000
Rp. 21.867.000
Rp. 40.000.000

TOTAL ANGGARAN

Rp. 700.328.508

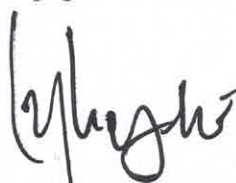
Sekretaris

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng

NOVAL A, SE.,MM

Pembina (IV/b)
Nip. 19761024 200502 1 002

Palu, 9 Maret 2026
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum


FEBRIANTI MAKARAU, ST.,MM

Penata Tk. I
Nip. 19810224 200801 2 014